

**PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG KARTU KELUARGA
SEJAHTERA SEBAGAI ALAT TRANSAKSI NONTUNAI (STUDI KASUS
E-WARONG KOTA YOGYAKARTA)**

Oleh: Alvin Adnan Imawan¹ dan Hariyanto²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Pelindungan Hukum bagi Pengguna Kartu Keluarga Sejahtera sebagai Alat Transaksi Nontunai di E-Warong Yogyakarta.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris yang didukung wawancara dengan responden. Sifat penelitian adalah deskriptif. Jenis data dan sumber yang digunakan adalah data primer dan sekunder sebagai sumber yang didapatkan dari studi lapangan dan kepustakaan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan metode kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pelindungan hukum bagi pemegang Kartu Keluarga Sejahtera adalah pelindungan hukum yang diberikan ditinjau dari aspek transparansi informasi produk dan kemanan teknologi. Penerapan transparansi produk Kartu Keluarga Sejahtera belum sepenuhnya dilakukan karena informasi terkait produk tidak dijelaskan secara lengkap dan penerapan keamanan teknologi perlu dilakukan peningkatan. Pelindungan hukum preventif dan represif digunakan untuk menjamin kedudukan pemegang Kartu Keluarga Sejahtera dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebagai penerbit kartu. Dalam upaya pelindungan terhadap kehilangan kartu, tanggung jawab PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. hanya sebatas pengembalian sisa saldo yang terdapat pada kartu yang rusak/hilang, pengembalian tersebut relatif lama dan pada umumnya melebihi 14 hari serta tidak dapat dilakukan secara tunai.

Kata Kunci: Pelindungan Hukum, Kartu Keluarga Sejahtera, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

¹ Mahasiswa Program Studi Strata 1 (S-1) pada Departemen Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

² Dosen Departemen Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

LEGAL PROTECTION FOR KARTU KELUARGA SEJAHTERA USER AS A MEANS OF NON CASH TRANSACTIONS (STUDY CASE ON E-WARONG YOGYAKARTA)

Author: Alvin Adnan Imawan³ and Hariyanto⁴

ABSTRACT

This study aims to review and analyze Legal Protection for Kartu Keluarga Sejahtera Card users as the Non-cash transaction tool at E-Warong Yogyakarta.

The normative-empirical research method is used in this research, which is supported by interviews and respondents. The research is descriptive. Primary and secondary data types are used as sources, obtained from field studies and literature. The research data was then analyzed by qualitative methods.

Based on the research pursue, legal protection for *Kartu Keluarga Sejahtera* users is a legal protection that provided in terms of product information transparency and technology security aspects. The implementation of the transparency of *Kartu Keluarga Sejahtera* product has not been fully implemented because information towards product is not fully explained yet and the needed of improvement related to its technology security. Preventive and repressive legal protection is used to guarantee the *Kartu Keluarga Sejahtera* user and PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. as an issuer of this card. In an attempt to protect due to card loss, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. only return the remaining balance due to damaged or lost card as the responsibility. The return is relatively long which is needed more than 14 days and could do in Non-cash only.

Keywords: Legal Protection, Kartu Keluarga Sejahtera, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

³ Undergraduate Student at Business Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

⁴ Lecturer at Business Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.